

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbelahnya dua Korea pasca Perang Dunia II oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang hingga saat ini menjadikan Amerika Serikat merupakan aliansi dari Korea Selatan dan Korea Utara memiliki aliansi dengan Tiongkok. Sejak berakhirnya Perang Korea hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara dikelilingi dengan ketegangan yang terjadi secara periodik. Catatan panjang sejarah hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara hingga 2017 presiden terpilih Donald Trump masih mengalami situasi dan suasana yang memanas dengan Korea Utara terkait dengan pengembangan senjata nuklirnya. Pengembangan senjata nuklir yang di bangun oleh Korea Utara dibentuk sebagai pertahanan rezim Korea Utara dan untuk memperkuat militernya serta menginginkan jaminan keamanan dari adanya kemungkinan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan aliansinya yakni Jepang dan Korea Selatan (Syahrin, 2018, hal. 117). Hal ini juga memperhatikan aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan yang secara rutin melakukan latihan militer bersama di semenanjung Korea.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada awal menjalankan pemerintahannya semakin gencar menunjukkan *First Military Policy* yang terlihat dengan semakin efektifnya melakukan modernisasi sistem persenjataan Korea Utara (Yoo, 2012, hal. 335). Hal ini menunjukkan wajah kebijakan luar negeri Korea Utara yang fokus pada militer, namun ini menimbulkan ancaman di

kawasan dan juga bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat telah banyak terlibat dalam beberapa putaran diplomasi untuk menghilangkan ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara. Seperti pada tahun 2003, Amerika Serikat mengusulkan pembicaraan multilateral mengenai masalah nuklir Korea Utara, namun respon yang dikeluarkan oleh Korea Utara adakala mengatakan akan mengambil langkah-langkah menuju denuklirisasi. Kemudian hal tersebut tidak sejalan dengan tindakan yang diambil Korea Utara yang terus melakukan uji coba nuklir yang melanggar hukum internasional termasuk peluncuran rudal balistik, tiga rudal balistik antarbenua (ICBM), dan uji coba nuklir terbesar pada tahun 2017 (Affairs, 2018).

Ketegangan di Semenanjung Korea membuat keadaan di kawasan Asia Timur khususnya Tiongkok, Jepang, dan Korea menjadi tidak kondusif dan tidak menentu. Korea Utara yang terus menerus mengembangkan nuklirnya, menimbulkan koalisi Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia Timur yakni Korea Selatan dan Jepang semakin kuat. Hal ini dapat menimbulkan *arms race* di kawasan Asia Timur tersebut. Korea Selatan yang kerap terancam dengan percobaan uji nuklir Korea Utara membangun sistem pertahanan untuk pertahanan keamanan dengan rudal milik Amerika Serikat yaitu *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). Menghadapi tindakan Korea Utara yang dapat meluncurkan nuklirnya sewaktu-waktu, Korea Selatan sebagai negara *middle power* tetap membutuhkan negara *super power* yakni Amerika Serikat yang juga telah menyediakan payung untuk negara aliansinya. Pengembangan program nuklir Korea Utara dan provokasi militer membuat Korea Selatan perlu

mengandalkan aliansi Amerika Serikat - Korea Selatan dalam berurusan dengan Korea Utara.

Aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan yang berjalan selama ini untuk menghadapi Korea Utara dianggap belum maksimal meredam aktifitas uji coba nuklir Korea Utara yang terus menimbulkan ketegangan di semenanjung Korea maupun di kawasan. Oleh karena itu, Korea Selatan berusaha menggunakan diplomasi *middle power* untuk mencegah krisis pengembangan nuklir Korea Utara dan mengurangi ketegangan keamanan di wilayah (Kim S.-M. , 2016, hal. 12). Hal tersebut yang menimbulkan hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara semakin mengalami ketegangan dan saling mengancam satu sama lain, sehingga sulit mendapatkan kepercayaan ditengah kedua belah pihak. Konsep *middle power* semakin terlihat dalam narasi diplomatik Korea Selatan yang digunakan oleh pemerintah sebagai strategi kebijakan luar negeri Korea Selatan. Dalam upaya eksistensi diri sebagai negara Asia yang maju pasca perang dingin, Korea Selatan mengembangkan konsep ini untuk mengartikulasikan kebijakan luar negerinya dan melegitimasi peran diplomatik yang lebih proaktif. Korea Selatan menggambarkan status *middle power* dengan karakter “penyeimbang”, “penghubung” atau “kekuatan menengah” (Kim S.-M. , 2016, hal. 2).

Identitas kekuatan menengah Korea Selatan semakin jelas di petakan melalui setiap strategi kebijakan luar negerinya. Korea Selatan mengidentifikasikan diri sebagai negara *middle power* untuk menunjukkan keterlibatannya dipanggung global sejak tahun 1991 pada saat kepemimpinan presiden Roh Tae-Woo menggunakan istilah “*middle power*” sebagai bentuk aspirasi Korea Selatan di lingkup internasional. *Middle power* saat itu

menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan pasar bebas yang sukses, serta berpartisipasi aktif dalam forum-forum multilateral untuk mengejar agenda keamanan (Shin, 2015, p. 9).

Korea Selatan adalah kekuatan menengah yang berhasil dan berada pada posisi yang tepat di atas kapabilitasnya dalam sistem internasional. Kepemimpinan Korea Selatan dan partisipasi proaktif dalam urusan global menunjukkan kemampuan Korea Selatan untuk memainkan peran penting di panggung global. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas internasionalnya dari forum internasional seperti KTT G-20 Seoul, KTT Keamanan Nuklir 2012, dan *The 4th High-Level Forum on Aid Effectiveness*. Forum-forum internasional ini yang diikuti oleh Korea Selatan selain meningkatkan profil internasional juga menunjukkan kapasitas nasionalnya yang mencerminkan karakteristik negara *middle power* sebagai *bridge builder* dan penentu agenda (Dumond V. D., 2017).

Mengembangkan statusnya sebagai *middle power* dibanding negara *middle power* tradisional seperti Australia, Kanada, Norwegia dan Swedia, Korea Selatan memprakarsai diplomasi kekuatan menengahnya dari pemerintahan Roh Moo-hyun (2003-2008) yang dikenal “Korea Selatan sebagai penyeimbang di Asia Timur Laut” (Lee K. S., 2016, hal. 44). Kemudian status ini berlanjut berselang berganti kepemimpinan hingga saat ini. Korea Selatan berada dalam posisi yang strategis untuk mengambil inisiatif dalam mempromosikan kerja sama kelembagaan regional untuk memiliki andil dalam menjaga perdamaian di kawasan (Choi, 2014, hal. 53). Aliansi ini membuat Korea Selatan berada di bawah payung nuklir Amerika Serikat dan terus menghadapi era krisis nuklir

Korea Utara. Sehingga Korea Selatan dianggap mumpuni untuk berkontribusi dalam peningkatan stabilitas politik dan keamanan di semenanjung Korea.

Besarnya ancaman militer datang dari Korea Utara yang berhasil tumbuh dan berkembang dalam program pengembangan nuklir dan teknologi misil, menimbulkan kekhawatiran Korea Selatan hingga terus melakukan peningkatan kekuatan dan kapasitas militernya melalui bantuan militer dari Amerika Serikat dan didukung oleh kemajuan ekonomi negaranya (Syahrin, 2018, hal. 122). Hal ini berdasar pada *timeline* hubungan kedua negara di tahun 2017 yang semakin memanas karena adanya uji coba rudal balistik antar benua yang seluruh wilayah Amerika Serikat berada dalam jangkauan *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) Korea Utara (Wadrianto, 2017). Korea Utara juga banyak menuai kecaman dunia internasional hingga dijatuhkannya sanksi PBB dan Amerika Serikat atas program persenjataan nuklir dan uji coba misilnya (BBC, 2017).

Amerika Serikat yang merupakan aliansi utama Korea Selatan memiliki serangkaian kegiatan bersama untuk meningkatkan pertahanan militer Korea Selatan di kawasan. Hal ini yang kemudian dianggap sebagai ancaman invasi dan tindakan provokasi Korea Selatan untuk menyerang Pyongyang sehingga Korea Utara terus melakukan pengembangan senjata nuklir. Program senjata nuklir Korea Utara dan uji coba yang dilakukan menarik perhatian dunia internasional terutama Amerika Serikat. Senjata nuklir Korea Utara telah menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat di semenanjung Korea, karena ini dapat mengancam stabilitas regional dan rezim nonproliferasi global (Wertz, 2018, p. 2). Tantangan ancaman keamanan ini membuat Korea Utara menjadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama dalam masalah keamanan

nasional Amerika Serikat, yang mana fokus kebijakan ini melampaui Timur Tengah dan terorisme dalam 18 bulan pertama pemerintahan Trump.

Korea Utara telah secara progresif mempercepat kemajuan dalam pembangunan program nuklirnya, hal ini terlihat pada uji coba yang terhitung sebanyak lima kali yaitu dua kali pada bulan Juli, Agustus, September, dan November di tahun 2017. Korea Utara juga melakukan uji coba dengan meluncurkan empat rudal balistik yang tiga diantaranya jatuh di laut Jepang, dan percobaan ini merupakan uji coba pertama kali yang dilakukan sejak terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AP, 2018). Pemerintahan Trump menyoal ancaman terhadap tindakan Korea Utara dan menginginkan Kim Jong-Un presiden Korea Utara terlibat dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) yang mana ini merupakan agenda kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melihat adanya uji coba nuklir yang dilakukan pada masa kepemimpinan presiden Trump, pemerintah Amerika Serikat pada tahun pertama mengumumkan sebuah komitmen untuk menggantikan kebijakan yang dianggap gagal yaitu "*strategic patience*" menjadi strategi "*maximum pressure*". Hal ini dilakukan Amerika Serikat dengan tujuan memberikan sanksi yang lebih keras dan untuk meningkatkan isolasi terhadap Korea Utara (KPN, 2019, pp. 2-3). Amerika Serikat menjadi kunci penting dalam mengambil tindakan untuk menekan dan mengisolasi Korea Utara, sehingga Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian secara diplomatis juga memiliki andil yang penting.

Program pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang pesat disertai dengan uji coba nuklir menimbulkan hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara semakin menegang. Pada tahun 2017, serangkaian resolusi sanksi baru PBB

terhadap Pyongyang mulai dijalankan seperti menindak keras kesempatan Korea Utara untuk mengimpor bahan bakar dan komoditas lainnya. Selain itu, Amerika Serikat juga berusaha menerapkan sanksi dengan mendekati negara-negara untuk memutuskan hubungan ekonomi dan diplomatik mereka dengan Korea Utara. Amerika Serikat memilih bekerjasama dengan Beijing dalam menekan Korea Utara dengan menahan sengketa dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga Tiongkok dalam hal ini juga telah berpartisipasi menegakkan sanksi-sanksi PBB (Wertz, 2018, pp. 15-16). Hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat semakin bersitegang setelah pada bulan Agustus 2017, Korea Utara kembali melakukan dua uji coba terhadap Hwasong-14 ICBM. Kemudian, hal ini memicu respon dari Amerika Serikat sehingga presiden Trump mengatakan *“They will be met with the fire and the fury like the world has never seen.”* kepada media terkait Korea Utara yang terus mengancam Amerika Serikat (Bierman, 2017). Pada akhir tahun 2017, Korea Utara berhasil mengembangkan ICBM bersenjata nuklir yang kemudian dapat terus mengancam Amerika Serikat. Setelah melakukan uji coba pada Hwasong-15, presiden Korea Utara Kim Jong Un menyatakan bahwa program nuklir negara memiliki bahan yang cukup dan lengkap hingga mendekati garis *finish*. Kemudian pada pidatonya di tahun baru 2018, Korea Utara menunjukkan rencana untuk senjata nuklirnya yang beralih dari sekedar pengembangan dan pengujian, menjadi ke produksi massal hulu ledak nuklir dan rudal balistik (Wertz, 2018, p. 17).

“Uji Coba Nuklir dan Peluncuran Missile Korea Utara Tahun 2017”

2 Februari 2017	Medium Range Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
3 Juni 2017	Medium Range Ballistic Missile (x4) : Landed Sea of Japan/East Sea
5 April 2017	Intermediate Range Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
16 April 2017	Intermediate Range Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
29 April 2017	Intermediate Range Ballistic Missile : Landed Tokchang, South Pyongyang Province
14 Mei 2017	Intermediate Range Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
21 Mei 1997	Medium Range Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
29 Mei 1997	Short Range Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
8 Juni 2017	Land-to-Ship Missile (x4) : Landed Sea of Japan/East Sea
4 July 2017	Intercontinental Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
28 July 2017	Intercontinental Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
26 Agustus 2017	Short Range Ballistic Missile (x3) : Landed Sea of Japan/East Sea
29 Agustus 2017	Intercontinental Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea
3 September 2017	Sixth Nuclear Test / Hydrogen Bomb
15 September 2017	Intercontinental Ballistic Missile : Landed Pacific Ocean
29 November 2017	Intercontinental Ballistic Missile : Landed Sea of Japan/East Sea

Tabel 1 1 Uji Coba Nuklir Korea Utara selama Tahun 2017 (NTI, 2017).

Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir sepanjang tahun 2017 yang menjadi meningkatkan tensi diantara Amerika Serikat dan Korea Utara. Uji coba ini memicu respon Amerika Serikat yang memungkinkan untuk melakukan serangan militer terhadap Korea Utara dan mengancam akan meluncurkan perang. Namun, setelah ketegangan yang terus terjadi di tahun 2017, pada Januari 2018

Korea Utara mulai sedikit melunak dengan menerima undangan dari presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin 2018 di PyeongChang, Korea Selatan. Kemudian disusul dengan Amerika Serikat yang juga menerima undangan dari Korea Selatan untuk bertemu dan berdialog dengan Korea Utara, selain itu juga Amerika Serikat juga menyetujui untuk menunda jadwal latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan sampai setelah olimpiade.

Kemudian pada bulan Maret dalam pertemuan tingkat tinggi kedua korea, Korea Utara menyampaikan ingin bertemu presiden Amerika Serikat dan sebagai bentuk realisasi niat tersebut, Korea Utara melepaskan tiga tahanan Amerika Serikat. Selanjutnya pada 12 Juni, KTT Trump-Kim di Singapura yang dikenal dengan *Singapore Summit* menghasilkan pernyataan bersama yang sepakat untuk meningkatkan hubungan dan menciptakan rezim yang aman dan damai, serta komitmen Korea Utara untuk denuklirisasi. Kesepakatan juga berlaku bagi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk menanggukkan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan dalam skala besar, serta akan menandatangani deklarasi yang menandakan berakhirnya Perang korea (KPN, 2019, p. 3).

Diplomasi Amerika Serikat dibawah Presiden Trump ditengah *unpredictable* dari langkah-langkah Korea Utara membuat Amerika Serikat setuju berada di meja perundingan bersama Korea Utara membahas denuklirisasi yang disampaikan pada KTT Amerika Serikat – Korea Utara pada 12 Juni 2018 dengan mengeluarkan pernyataan

“I just think that we are now going to start the process of denuclearization of North Korea, and I believe that he’s going back and it will start virtually immediately – and he’s already indicated that and you look at what he’s done.” – President Donald J Trump, Singapore 12 June 2018 (Hemmings, Pardo, & Kong, Negotiating The Peace : Diplomacy on The Korean Peninsula, 2018).

Kemudian adapun hasil dari KTT Amerika Serikat – Korea Utara pada 12 Juni 2018 :

1. Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk membangun hubungan Amerika Serikat – Korea Utara yang baru sesuai dengan keinginan masyarakat dari kedua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.
2. Amerika Serikat dan Korea Utara akan bergabung dengan upaya mereka untuk membangun sebuah rezim perdamaian yang langgeng dan stabil di Semenanjung Korea
3. Menegaskan kembali Deklarasi Panmunjom, 27 April 2018, DPRK berkomitmen untuk bekerja menuju denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea.
4. Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk memulihkan tetap POW/MIA, termasuk repatriasi langsung dari mereka yang sudah diidentifikasi (CSIS, 2018).

KTT tersebut menghasilkan deklarasi bersama yang menegaskan kembali komitmen Korea Utara terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea dan komitmen Amerika Serikat dalam hal keamanan. Negosiasi Amerika Serikat dengan Korea Utara jelas dan tetap konsisten. Amerika Serikat menginginkan Korea Utara menjalankan komitmen dalam mengambil langkah-langkah konkret denuklirisasi untuk diselesaikan, diverifikasi, dan tidak dapat diubah lagi (CVID), artinya

komitmen ini menegaskan komitmen untuk Semenanjung Korea yang bebas nuklir dan menuju CVID. Namun, deklarasi KTT tersebut kurang spesifik bagaimana negosiasi selanjutnya akan berlangsung dan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Meskipun demikian, KTT ini berfungsi terutama sebagai pertemuan dan salam bagi Amerika Serikat dan Korea Utara untuk saling mengenal dan membangun hubungan kepercayaan agar terciptanya persepsi yang sama untuk diimplementasikan dalam tindakan yang nyata (Desmaele, 2018).

Peran Korea Selatan dalam isu ini nampaknya memberikan pengaruh yang besar bagi krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara. Peran tersebut akan dilakukan Korea Selatan karena memiliki kepentingan politik dan juga ekonomi dari kebijakan yang akan diambil tersebut. Hal ini juga untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara dengan status *middle power* yang harus memiliki peran dan pengaruh yang signifikan di kawasan hingga global. Sehingga ini kemudian akan di bahas oleh penulis dengan menganalisis peran Korea Selatan dalam menghadapi krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan di 2017-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, terdapat satu rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu: Bagaimana peran Korea Selatan sebagai negara *middle power* terhadap krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara di tahun 2017-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran Korea Selatan dan kebijakannya melalui konsep *middle power* terhadap krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara
2. Mengetahui dampak diplomasi tersebut terhadap hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara

1.4 Signifikansi

Topik pada penelitian ini sangat relevan untuk diteliti melihat ketegangan yang terus terjadi pada Amerika Serikat dan Korea Utara karena program nuklir yang dikembangkan menimbulkan keadaan yang tidak stabil di kawasan Asia Timur dan juga menyebabkan krisis pada hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara. Penelitian ini melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya terkait hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang selalu menegang hingga cakupan tahun pada penelitian ini. Sebagaimana pada penelitian sebelumnya mengenai hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang ditulis oleh Emma Chanlett-Avery melalui diplomasi nuklir yang dilakukan oleh kedua negara dan melihat situasi internal atau domestik dari Korea Utara. Namun, tulisan tersebut belum memperlihatkan peran Korea Selatan dan mencoba dengan pendekatan diplomasi lain seperti diplomasi *middle power*. Sama halnya dengan tulisan oleh Hyon Joo Yoo yang berfokus pada upaya Korea Selatan dalam menghadapi ancaman program nuklir dari Korea Utara dengan cara memainkan perannya secara bilateral dengan aliansinya yakni Amerika Serikat. Oleh karena itu, peneliti

mencoba membahas dengan melihat latar belakang hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang menegang mulai 2017 hingga 2018 dengan memasukan peran Korea Selatan melalui diplomasi *middle powernya*. Sehingga penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dengan melihat peran dari Korea Selatan tersebut.

1.5 Cakupan Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui diplomasi *middle power* dalam menghadapi krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara di tahun 2017 hingga 2018. Melihat latar belakang sejarah hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara di tahun 2017 yang menegang hingga memicu konflik di antara keduanya. Kemudian pada tahun 2018 tensi diantara keduanya mulai mereda dan memutuskan memulai dialog setelah di tahun 2017 sejarah panas hubungan kedua negara semakin meninggi. Hal ini juga tentu terdapat peran Korea Selatan, sehingga penelitian ini berfokus pada *range* waktu tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana peran, posisi, dan kebijakan yang akan diambil oleh Korea Selatan dengan diplomasi *middle power* terhadap krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara di tahun 2017 – 2018.

1.6 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menuliskan mengenai peran diplomasi *middle power* Korea Selatan dalam beberapa isu dan pemerintahan. Young Jong

Choi membahas mengenai diplomasi *middle power* menunjukkan bahwa kelompok kategori ini memiliki kinerja yang baik dalam membuat dampak yang berarti pada dunia politik kekuatan besar (*great power*). Korea Selatan fokus pada kelompok kategori ini (*middle power*) khususnya karena hubungannya dengan negara hegemon. Diplomasi *middle power* tidak dapat berhasil jika memusuhi hegemon. Sehingga masa depan kekuatan menengah Korea Selatan akan bergantung pada kerja sama yang kuat dengan Amerika Serikat. Korea Selatan mungkin tertinggal dari kekuatan menengah tradisional seperti Kanada, Australia, dan sebagian besar negara Nordik dalam hal kemampuan diplomatik dan komitmen terhadap internasionalisme. Namun, Korea Selatan telah lama mempertahankan identitas yang kuat sebagai kekuatan menengah. Masalah nuklir Korea Utara yang mengancam keamanan wilayah, upaya yang dilakukan Korea Selatan tidak dapat lagi diselesaikan secara bilateral, melainkan melalui pendekatan multilateral yang juga kemudian akan membutuhkan upaya negosiasi berkelanjutan dari organisasi regional (Choi, 2014, hal. 52-56).

Pada riset yang lain, Iain Watson menulis mengenai Korea Selatan sebagai kekuatan menengah membangkitkan dan mengeksplorasi strategi dalam konteks geopolitik melalui beragam bentuk penyertaan multilateralisme. Selama krisis nuklir Korea Utara, Korea Selatan mulai merumuskan strategi “*2017 Northern and 2017 Southern*” yang masih berpotensi berdampak pada posisi Korea Selatan di kawasan melalui penekanan pada konektivitas sub-regional. Watson juga berpendapat bahwa Korea Selatan memanfaatkan krisis nuklir untuk meningkatkan hubungan jaringan regional dan subregional sebagai alternatif strategi kekuatan menengah untuk menemukan cara dalam membuat pilihan

diantara hegemoni di kawasan atau terikat pada aspirasi multilateralisme, seperti melalui rezim proliferasi non-nuklir. Tulisan ini menggunakan *network theory* untuk menunjukkan bagaimana kebijakan dan respons nuklir Korea Selatan bergeser dari asumsi dan parameter neo realis dan liberal institusionalis selama ini dalam krisis nuklir Korea Utara saat ini (Watson, 2018, hal. 2-22).

Sementara itu, Emma Chanlett-Avery spesifik membahas mengenai hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat melalui diplomasi nuklir dan melihat situasi internal kedua negara. Diawali dengan menjelaskan kepentingan Amerika Serikat di Korea Utara yaitu mencakup masalah keamanan, politik, dan hak asasi manusia. Aliansi militer Amerika Serikat dengan Korea Selatan terus dipertahankan untuk mengatasi ancaman dan serangan apapun dari Korea Utara. Kemajuan Korea Utara yang sangat cepat dalam kemampuan nuklir dan rudalnya menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat karena jarak jauhnya dapat mencapai Amerika Serikat. Sehingga negosiasi dan diplomasi terkait program senjata nuklir Korea Utara mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan semua kekuatan utama di kawasan tersebut, terutama Tiongkok dan Korea Selatan (Emma Chanlett-Avery, 2018, hal. 1-2).

Sedangkan Sang Hoon Park menuliskan bahwa perspektif pada aliansi Amerika Serikat – Korea Selatan memiliki perbedaan dalam melihat ancaman nuklir Korea Utara. Program nuklir Korea Utara dilihat sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea dan di kawasan Asia Timur Laut. Namun, prioritas kedua negara berbeda, Amerika Serikat menganggap program nuklir Korea Utara sebagai ancaman terhadap nonproliferasi nuklir global. Sementara Korea Selatan memandangnya sebagai

penghambat hubungan antar dua Korea. Sehingga Amerika Serikat memasukkan agenda program nuklir Korea Utara dalam diskusi dan memimpin kampanye diplomatik yang kuat untuk menghalang pengembangan lebih lanjut. Tulisan ini menjelaskan pandangan Amerika Serikat yang menilai bahwa program ini akan mengganggu stabilitas regional di Asia Timur Laut yang mana akan menyebabkan perlombaan senjata nuklir di kawasan. Adapun perspektif Korea Selatan memandang Korea Utara tidak hanya sebagai musuh tetapi juga mitra dalam penyatuan, sehingga Korea Selatan mulai mempertimbangkan tindakan yang akan di ambil tanpa memicu konflik tetapi dapat menetralsir ancaman dari Utara (Park, 2014, hal. 85-86).

Selanjutnya Hyon Joo Yoo lebih dalam menunjukkan upaya Korea Selatan untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat adalah didorong oleh ancaman yang terus datang dari Utara. Sedangkan kerjasama Korea Selatan dengan Amerika Serikat ini merupakan sumber ketegangan untuk Korea Utara dan Tiongkok. Ancaman Korea Utara membuat Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan transformasi *US Forces in Korea (USFK)* dan Korea Selatan memahami bahwa tidak mungkin untuk menolak keputusan tersebut, sehingga Korea Selatan mendukung strategi ini. Korea Selatan juga menyetujui untuk memindahkan *basecamp* pasukan Amerika Serikat ke Pyongtaek dan Osan, Seoul bagian Selatan, dan memberikan mereka mobilitas yang lebih besar. Perspektif Korea Selatan terkait transformasi ini adalah jika penurunan jumlah dan kapasitas pasukan Amerika Serikat di Korea maka akan mempengaruhi pertahanan dan pencegahan dari Utara (Yoo, 2012, hal. 340-346).

Seluruh penelitian yang telah dipaparkan di atas, belum spesifik membahas mengenai peran dan kebijakan dari Korea Selatan sebagai negara *middle power* yang memanfaatkan diplomasinya dalam menghadapi krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara di tahun 2017 hingga 2018. Seperti penelitian yang ditulis oleh Young Jong Choi memaparkan bagaimana menjalankan dengan maksimal diplomasi *middle power* agar dapat berhasil, disini dijelaskan bahwa Korea Selatan telah lama mempertahankan status *middle power* dengan menjalin hubungan bilateral dengan *great power*. Tidak hanya ini, Iain Watson menuliskan bahwa krisis nuklir Korea Utara berdampak pada posisi Korea Selatan di kawasan untuk memainkan peran dengan meningkatkan hubungan jaringan regional dan subregional. Menurut Emma Chanlett-Avery, diplomasi nuklir dilakukan untuk membahas hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat juga dengan mempertahankan aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk pertahanan mengatasi ancaman dari Korea Utara.

Sementara itu, riset lain oleh Sang Hoon Park menulis mengenai perspektif dari Amerika Serikat dalam melihat dan merespon tindakan dari Korea Utara dan juga perspektif Korea Selatan dalam melihat hal tersebut. Sedangkan Hyon Joo Yoo dalam penelitiannya menulis dengan menunjukkan upaya Korea Selatan yang merasa terancam dengan Korea Utara sehingga memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat, namun sebaliknya aliansi ini yang menjadi sumber ketegangan Korea Utara dan Tiongkok yang kemudian melancarkan program nuklirnya. Meskipun demikian, belum ada riset yang secara spesifik menjelaskan peran Korea Selatan dalam krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang menegang hingga mengkhawatirkan negara-negara khususnya

di kawasan akan adanya *arms race*, termasuk dalam penelitian Choi. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis akan fokus untuk mengisi ceruk analisis tersebut dengan menyediakan analisis peran yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menghadapi krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan di tahun 2017 hingga 2018, yang mana hal ini belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

1.7 Landasan Konseptual

Middle Power

Landasan konseptual yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah *Middle Power*. Konsep *middle power* atau kekuatan tengah berasal dari akhir abad ke-16 saat filsuf Renaissance Italia yaitu Giovanni Botero mengelompokkan dunia menjadi tiga jenis negara, yakni kekaisaran (*grandissime*), kekuatan tengah (*mezano*), dan kekuatan kecil (*piccioli*). Istilah kekuatan menengah mendefinisikan seperti apa aktor dalam hal ini negara bertindak atau merujuk pada statusnya sebagai *middle power* (Larson, T.V, & Wohlforth, 2014, hal. 3). Konsep tentang kekuatan tengah di teliti dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989. Banyak karya dari hasil penelitian mengenai konsep *middle power* yang populer seperti Stokke di tahun 1989, Pratt pada tahun 1990, namun kontribusi signifikan untuk menggambarkan konsep *middle power* melalui analisis terperinci dari pola perilaku diplomatik kekuatan menengah ialah penelitian oleh Cooper pada tahun 1993.

Menurut Cooper, Higgott, Nossal (1993), kekuatan menengah cenderung didefinisikan untuk memiliki solusi dalam isu-isu internasional

yang diajukan untuk diagendakan. Kemudian juga cenderung untuk menggunakan pendekatan kompromi dalam perselisihan internasional, serta cenderung untuk menerima gagasan mengenai kewarganegaraan internasional yang baik untuk memulai dan menjalankan diplomasi (Cooper, Higgott, & Nossal, 1993, p. 19). Keberadaan *middle power* diantara kekuatan besar dan negara-negara kecil dalam sistem global menimbulkan kekuatan menengah cenderung memainkan peran yang paling nampak untuk menegaskan pengaruh mereka di wilayah mereka sendiri, yaitu dimana kepentingan langsung mereka berada.

Middle Power memiliki atribut-atribut yang mendefinisikan negara-negara sebagai kekuatan menengah yaitu berpartisipasi aktif dalam bidang isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan lingkungan serta menghormati norma-norma internasional, dan mengadvokasi kerjasama multilateralisme. Pendekatan kekuatan menengah untuk diplomasi menekankan bakat atau kemampuan dan kompetensi teknis negara *middle power* dalam mengejar kegiatan diplomatik. Konsep kekuatan menengah dengan demikian didasarkan pada kemampuan untuk menggunakan asset non-material seperti persuasi untuk membangun koalisi. Sehingga, pola perilaku kekuatan menengah menjadikan mereka *catalyst, facilitator, and manager* (Cooper, Higgott, & Nossal, 1993, p. 24).

Adapun pola perilaku dari *middle power* dalam dunia hubungan internasional dan diplomasi, antara lain :

1. **Catalyst.** Kekuatan Menengah dapat bertindak sebagai katalisator sehubungan dengan upaya diplomatik, menyediakan energi intelektual dan politik untuk memicu inisiatif yang juga memimpin inisiatif tersebut dan mengumpulkan pengikut di sekitarnya

2. **Facilitator.** Aktor Kekuatan Menengah akan bertindak menjadi fasilitator untuk beberapa bentuk kegiatan asosiasi, kolaboratif, dan koalisi. Pembangunan koalisi untuk isu-isu spesifik adalah teknik utama kepemimpinan bagi kekuatan menengah, yang tidak memiliki sumber kekuatan struktural yang tersedia untuk kekuatan besar. Bentuk koalisi adalah sarana untuk meningkatkan kekuatan dengan negara-negara yang memiliki pandangan sama. Pola perilaku ini selalu melibatkan perencanaan, pertemuan, dan penyelenggaraan pertemuan formatif, menetapkan prioritas untuk kegiatan di masa depan dan menyusun deklarasi retorika dan manifesto.

3. **Manager.** Pola ketiga adalah manajer, yang mana menenkankan pada pembangunan institusi. Pembangunan institusi digunakan di sini dalam arti luas untuk mencakup tidak hanya penciptaan

organisasi dan rezim formal tetapi juga pengembangan konvensi, deklarasi dan norma. Tahap manajerial ini juga membutuhkan pengembangan langkah-langkah membangun kepercayaan dan fasilitas penyelesaian sengketa, di mana kepercayaan dan kredibilitas itu dibangun. Membangun kepercayaan juga berupaya untuk mengurangi kesalahpahaman yang dapat dilakukan melalui upaya penghubung, *shuttle diplomacy*, penggunaan alternatif formal dan informal, penciptaan transparansi, dan cara-cara lain untuk mendorong proses tertentu ke depan. Selain itu, kegiatan ini dapat dilengkapi dengan dorongan untuk menunjukkan relevansi atau pentingnya inisiatif dalam sebuah isu. (Cooper, Higgott, & Nossal, 1993, pp. 24-25)

Cooper, Higgott, dan Nossal berpendapat bahwa ketiga jenis pola perilaku ini disebut dengan ceruk diplomasi yang mana kekuatan menengah memusatkan fokusnya di bidang isu tertentu atau spesifik dan mengupayakan peran mereka untuk mengambil keuntungan relative (Cooper, Higgott, & Nossal, 1993, pp. 25-26). Berdasar pada pola perilaku diatas yang menjelaskan peran aktor dalam konsep *middle power*, skripsi ini akan mengaplikasikan pola perilaku tersebut terhadap peran Korea Selatan dalam menghadapi krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea

Utara, karena seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa Korea Selatan sebagai negara *middle power* memiliki kemampuan memainkan peran kekuatan menengah dalam ketegangan hubungan kedua negara. Hal ini akan menjadi asumsi dasar dan inti dari konsep *Middle Power* yang mana menggunakan negara sebagai aktor utamanya yang akan bertindak untuk meminimalisir konflik.

Penggunaan tiga komponen dalam analisis skripsi ini dikarenakan pada atribut *Catalyst*, Korea Selatan dalam menjalankan diplomasi *middle power* terlihat memiliki kemampuan dalam menginisiasi komunikasi diplomatik diantara dua negara berseteru. Selain itu, dapat menjadi mediator yang menginisiasi terciptanya kolaborasi antara kekuatan besar yang akan mempromosikan mekanisme kolektif penyelesaian perselisihan. Korea Selatan dapat menjalankan strategi diplomasi kekuatan menengahnya dalam menginisiasi isu dengan Amerika Serikat yang memiliki ketegangan dengan Korea Utara agar tidak menggunakan jalur kekerasan. Selain itu, menginisiasi isu melalui dialog yang terus berjalan dengan Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh disekitar. Kemudian, pada atribut *Facilitator*, akan terlihat seperti apa tindakan atau peran yang diambil oleh aktor dalam hal ini Korea Selatan dalam memainkan diplomasi *middle power* dengan membentuk kegiatan kolaboratif yang membangun koalisi berdasarkan kerjasama untuk mengurangi ketegangan melalui koalisi ROK – US – Japan yang menyusun perencanaan, pertemuan, dan menetapkan prioritas kepentingan. Terakhir, pada atribut *Manager* yang ditunjukkan dalam inisiasi Korea Selatan dalam melakukan

dialog dan hubungan dengan Korea Utara untuk membangun kepercayaan dan memiliki penghubung agar terciptanya transparansi serta memiliki deklarasi untuk mendukung tatanan perdamaian. Sehingga, penulis akan meneliti peran *catalyst*, *facilitator*, dan *manager* yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan di tahun 2017 – 2018.

Demikian, skripsi ini akan menganalisis peran Korea Selatan melalui diplomasi *middle power* terhadap krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara melalui tiga atribut atau komponen. Ketiga komponen tersebut adalah:

“Pengaplikasian *The Concept of Middle Power* dalam melihat peran diplomasi Korea Selatan dalam krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara”

Catalyst	Facilitator	Manager
1. Korea Selatan – Amerika Serikat 2. Korea Selatan - Tiongkok	1. Trilateral (Rok – U.S - Japan)	1. Korea Selatan – Korea Utara

Ketiga pola perilaku ini yang kemudian akan di analisis pada bab-bab selanjutnya yang menjadi variabel dalam konsep *middle power* terhadap peran Korea Selatan dalam krisis hubungan Amerika Serikat – Korea Utara tahun 2017 – 2018.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penggunaan metode kualitatif untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data. Metode kualitatif ini didefinisikan sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan mereview bahan bacaan atau kepustakaan diikuti dengan pengumpulan data dan analisa data, kemudian penelitian akan berakhir pada laporan hasil penelitian berupa data deskriptif (Raco, 2010, hal. 6).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu negara sebagai aktor utama yakni Korea Selatan dalam melakukan diplomasi *middle power* sebagai strategi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi krisis hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan tahun 2017 – 2018. Korea Selatan sebagai negara yang menunjukkan pola perilaku negara *middle power* akan memberikan peran dan pengaruhnya terhadap hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara di tahun tersebut.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Penelitian ini, sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder yaitu sumber data

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2014, hal. 131). Data sekunder dapat berupa bukti, catatan, atau laporan, buku, jurnal, artikel ilmiah maupun website pendukung untuk memperoleh sumber data untuk melengkapi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Cara mengumpulkan data akan diperoleh dari buku-buku, jurnal baik cetak maupun online, website pemerintah resmi, berita-berita yang membahas masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini, juga dari berbagai media massa cetak maupun online, serta dari lingkup nasional maupun internasional

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya adalah melakukan proses analisis data. Terdapat beberapa tahap dalam menganalisa data dari data yang diperoleh yakni melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, membuang yang tidak perlu, membuat ringkasan sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber, 2009, hal. 340). Penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Tahap selanjutnya ialah menarik kesimpulan yang berisi tentang rangkuman dari seluruh proses penelitian beserta hasil yang diperoleh (Dr.J.R.Raco, 2010, hal. 132).